



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

Prayudi

Analisis Legislatif Ahli Utama
prayudi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memfinalisasi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024 yang ditetapkan pada 3 November 2023. DCT tersebut antara lain memuat DCT anggota DPR sebanyak 9.917 orang. Semula berjumlah 9.918 orang, setelah dilakukan verifikasi kembali, berkurang 1 orang. Untuk DCT caleg DPRD Provinsi juga sudah difinalisasi. DCT tersebut antara lain, berdasarkan pengumuman KPU Provinsi Banten untuk DCT caleg DPRD Provinsi Banten, tercatat ada 1.333 orang yang masuk DCT, yang terdiri dari 833 caleg laki-laki (62,49%) dan 500 caleg perempuan (37,51%). Namun, dari DCT caleg DPRD Provinsi Banten tersebut terdapat 7 orang caleg mantan narapidana.

Masyarakat sipil mendorong partai politik agar caleg partainya menjalankan publikasi riwayat hidupnya. Bahkan, sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 meminta para caleg agar mengizinkan KPU membuka daftar riwayat hidupnya kepada publik. Selain merupakan wujud transparansi calon pejabat publik, publikasi riwayat hidup juga dinilai penting untuk menciptakan pemilih cerdas. Sebaliknya masyarakat jangan hanya fokus pada pemilu presiden/wakil presiden (Pilpres) 2024, karena pemilu anggota legislatif di pusat dan daerah (Pileg) juga penting. Sebagai tindak lanjut penetapan dan pengumuman DCT caleg, KPU mulai membuat contoh surat suara Pileg untuk disetujui oleh partai politik.

Setelah penetapan DCT, KPU mengumumkan semua caleg ke masyarakat. Pengumuman disertai publikasi daftar riwayat hidup dari caleg yang menyatakan persetujuannya dibuka ke publik. Karena data itu, termasuk data yang dikecualikan, maka diperlukan persetujuan sebelum dipublikasikan oleh KPU. KPU sudah menyampaikan ke pimpinan partai politik supaya caleg yang namanya ada di DCT berkenaan mempublikasikan daftar riwayat hidupnya. Pemilu di masa reformasi ini persentase caleg DPR, DPD, dan DPRDnya, yang bersedia mempublikasikan riwayat hidupnya masih rendah. Pada Pileg 2019, misalnya, hanya 49,5% dari 7.968 caleg DPR yang membuka riwayat hidup kepada publik.

Kebutuhan bagi pemilih untuk mengetahui riwayat hidup caleg dinilai semakin besar, sebab di satu sisi, pemilih masih kesulitan mengenali caleg, meskipun sudah banyak yang melakukan sosialisasi dan memasang baliho. Di sisi lain, masa kampanye pemilu kali ini hanya berlangsung 75 hari sehingga waktu bagi pemilih untuk mengenali caleg semakin terbatas. Terlebih, isu tentang Pileg tenggelam di tengah derasnya kontestasi Pilpres. KPU dan partai politik disarankan mendorong caleg bersedia mempublikasikan riwayat hidupnya. Sebagai pejabat publik, caleg seharusnya membuka diri kepada masyarakat yang diwakili. Keterbukaan ini justru dapat membuat peluang caleg dikenal dan dipilih saat pemungutan suara.

Atensi DPR

Publikasi riwayat hidup caleg penting sebagai salah satu upaya bagi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Banyak pihak mengharapkan caleg dan partai politik mendukung agar publikasi riwayat hidup caleg dapat berkembang luas dan menjadi bagian mendasar dari agenda Pemilu serentak 2024. Keengganan mempublikasikan riwayat hidup justru membuat pemilih “membeli kucing dalam karung”.

Publikasi caleg DCT Pemilu 2024 juga menjadi instrumen bagi keterbukaan dan akuntabilitas atas rekam jejak caleg yang sekaligus mendorong bagi pembentukan pemilih cerdas. Meskipun tetap mengingat ketentuan informasi yang dikecualikan dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Komisi II DPR melalui pelaksanaan fungsi pengawasannya harus mendorong KPU dan Bawaslu semaksimal mungkin menjalankan publikasi riwayat hidup caleg secara detail. Hal ini sekaligus menjadi langkah Komisi II DPR guna mendukung surat edaran KPU bagi partai-partai politik atas pemberian izin dari calegnya, termasuk bagi caleg perseorangan DPD, guna mempublikasikan riwayat hidup yang bersangkutan dan informasi rekam jejak caleg tersebut mudah diakses oleh masyarakat.

Sumber

detiknews.com, 3 November 2023;
Kompas, 30 dan 31 Oktober 2023; dan
Media Indonesia, 2 November 2023.

Minggu ke-1 November
(30 Oktober s.d. 5 November 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023